

KINERJA SKPD BURUK

Serapan APBD

Dibawah 50 Persen

PALU, MERCUSUAR- Rendahnya realisasi serapan APBD Sulteng 2011 yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi tolak ukur buruknya kinerja dinas/badan/instansi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Hingga September 2011, sebagian besar realisasi penyerapan anggaran tersebut, di



bawah 50 persen dari total alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan

rendahnya kinerja pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di masing-masing instansi. Terutama alokasi anggaran untuk belanja publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2011 yang disampaikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sidang paripurna DPRD, Senin (12/9), menunjukkan hingga triwulan III tahun anggaran 2011, anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp567 miliar lebih atau

hanya 46,02 persen.

Rendahnya serapan APBD juga berlaku pada sisi pendapatan daerah. Dari target APBD 2011 sebesar Rp1,168 triliun, hingga pertengahan tahun ini hanya terealisasi Rp922,8 miliar atau 78,99 persen.

"Berdasarkan ketentuan, idealnya pada triwulan III tahun anggaran, realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja sudah harus mencapai 80 persen. Ini menunjukkan rendahnya kinerja SKPD," kata Longki Djanggola yang ditemui usai paripurna.

Sementara itu, berdasarkan data laporan nota keuangan, realisasi anggaran belanja, untuk kategori belanja tidak langsung dari total alokasi anggaran sebesar Rp609 miliar lebih, hanya bisa terealisasi 58,37 persen atau sekitar Rp355 miliar lebih. Adapun untuk kategori

Baca APBD di hal 11

APBD Sulteng Tahun Anggaran 2011

| | |
|--|-----------------------|
| Anggaran Pendapatan yang direncanakan | Rp 1.168.203.130.349 |
| Realisasi s/d Triwulan III (Juli 2011) 78,99 % | Rp 922.818.576.318,81 |
| Anggaran Belanja yang ditetapkan | Rp 1.232.556.934.249 |
| Realisasi s/d Triwulan III (Juli 2011) 46,02 % | Rp 567.197.417.977,25 |

POSISI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| Anggaran Semula | Rp 1.168.203.130.349,00 |
| Bertambah | Rp 79.426.230.962,00 |
| Pendapatan Sesudah Perubahan | Rp 1.247.629.361.311,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| Anggaran Semula | Rp 1.232.556.934.249,00 |
| Bertambah | Rp 229.077.824.804,33 |
| Belanja sesudah Perubahan | Rp 1.461.634.759.053,33 |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Surplus/Defisit | Rp 214.005.397.742,33 |
|------------------------|------------------------------|

Waspada, Gubernur Mulai Gerah

• APBD

belanja langsung, serapan anggaran hanya mencapai 34,93 persen dari total alokasi anggaran Rp623 miliar lebih.

Parahnya lagi, untuk belanja modal yang digunakan membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, serapan anggaran hingga triwulan III 2011 hanya mencapai 28,41 persen. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal ini mencapai Rp176 miliar, sementara realisasinya hanya Rp46 miliar lebih.

Begitu juga dengan serapan anggaran belanja barang dan jasa. Rata-rata persentase realisasi di masing-masing SKPD di bawah 50 persen. Sehingga dari total alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp378 miliar lebih, hanya bisa dibelanjakan Rp136 miliar lebih atau hanya 37,50 persen.

Dengan kondisi realisasi serapan anggaran tersebut, Gubernur Longki Djanggola menegaskan, hingga akhir tahun ini, pihaknya belum

bisa memaksimalkan sinergitas kebijakan anggaran dengan visi dan misi yang diusung Gubernur-Wakil Gubernur periode 2011-2016.

Gubernur Longki dan wakilnya Sudarto yang baru dilantik 17 Juni lalu, mengusung program perbaikan infrastruktur wilayah, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat, saat maju sebagai pasangan calon dalam Pilgub Sulteng 2011. Visi-misi serta tawaran program perubahan tersebut, sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi Sulteng yang infrastruktur wilayahnya masih sangat buruk.

Untuk infrastruktur jalan misalnya, dari 1.600 kilometer jalan provinsi, yang rusak mencapai 600-an kilometer. Dengan tidak terealisasinya belanja modal pada APBD Sulteng 2011, bukan tidak mungkin sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan jalan pun tidak akan bisa maksimal di tahun anggaran ini.

Gubernur Longki menyatakan, di awal masa ke-

pemimpinannya ini, pihaknya belum bisa maksimal melaksanakan program pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang diusungnya di Pilgub lalu.

"Karena program dan kebijakan anggaran dalam APBD sudah disusun dan ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya. Sementara APBD perubahan ini masih terkait erat dengan program yang ditetapkan di awal tahun anggaran," ujar Gubernur Longki.

Sementara itu, berdasarkan laporan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2011, tahun ini Sulteng masih mengalami devisa anggaran hingga Rp214 miliar lebih. Untuk pendapatan daerah, dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,168 triliun lebih, terjadi penambahan Rp79,4 miliar lebih. Sementara untuk belanja daerah, dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,232 triliun, dalam perubahan APBD ini bertambah menjadi Rp1,461 triliun lebih. **ora**

sambungan dari hal. 1